

**PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BEKASI**

**Oleh:
GANIES AULIA RAMADHA
E1A013150**

ABSTRAK

Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan cita – cita bangsa sebagaimana yang termaktub dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh aparatur negara lain dibawahnya sebagai pelaksana tugas publik, dimana hubungan antara pemerintah dengan aparatur Negara dibawahnya merupakan hubungan dinas publik. Sebelum terciptanya hubungan dinas publik, maka seorang aparatur Negara harus ditetapkan menjadi pegawai aparatur Negara melalui proses rekrutmen. Dasar hokum pengadaan pegawai aparatur Negara adalah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kajian dalam tulisan ini adalah pengadaan PNS menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pengadaan PNS Kabupaten Bekasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti daftar pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Manajemen PNS diatur di dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 92 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya dalam Pasal 56 sampai Pasal 67 yang mengatur mengenai pengadaan PNS. Pengadaan PNS menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi PNS. Pengadaan PNS untuk wilayah Kabupaten Bekasi dikembalikan ke peraturan pelaksana yang lama atas dasar peraturan peralihan dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai pengadaan PNS yaitu dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.

Kata Kunci :Pengadaan PNS, Undang – Undang ASN, Kabupaten Bekasi

**THE RECRUITMENT OF CIVIL SERVANTS BASED ON
LAW NO. 5 BY 2014 REGARDING CIVIL STATE APPARATUS AT THE
LOCAL GOVERNMENT OFFICE OF THE DISTRICT BEKASI**

**By :
GANIES AULIA RAMADHA
E1A013150**

ABSTRACT

The government as the instrument of state completeness in carrying out their duties to embodying the ideals of the nations that had been written in Undang - Undang Dasar NKRI Tahun 1945 and Pancasila isn't working by itself but assisted by the state apparatus as executory public duties, where the relation between government and state apparatus is public civil relations. Before the creation of public civil relations, then a state apparatus must set into employees of the state apparatus through recruitment process. The legal basis of state apparatus recruitment process is Undang - Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

The study in this paper is recruitment of Civil Servants based on Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara and recruitment of Civil Servants in government offices at Bekasi regency. The Research methodology used is juridical normative namely research legal done by means of research list library or secondary data as starter to study by means of hold the search for to rules and literatures that related with problems.

Civil servants management is regulated in article 55 until article 92 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 about Aparatur Sipil Negara especially article 56 until article 67 which regulate about civil servants management. The recruitment of civil servants based on Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) is done through the planning, the announcement a vacancy, application, selection, admitted that the result selection, probation and assignation of a civil servant. The recruitment of civil servants in Bekasi regency's office government is returned to the old implementing regulations based on transitory regulation because there has no new rules that regulate about the recruitment of civil servants, which is Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.

Keywords : Recruitmen Civil Servants, Law No.5 By 2014 Regarding Civil State Apparatus, Bekasi.